



RENCANA KERJA 2025



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL Mayor SL Tobing No. 56, Tasikmalaya
www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang dengan kudrot-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program kerja, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025 dengan mengacu pada hasil program dan kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 Triwulan II serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya menetapkan program kerja Tahun 2025 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini menjadi upaya nyata guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dengan penetapan sasaran-sasaran strategis dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungannya, sumbang saran serta kritik yang membangun sehingga tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Tasikmalaya, 29 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM	II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	II-14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	II-18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	III-28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting	V-40
5.2 Kaidah-kaidah	V-40
5.2 Rencana Tindaklanjut.....	V-41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Program TA. 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2024 Kabupaten Tasikmalaya	II-9
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	II-17
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	II-20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BKD Propinsi Jawa Barat 2019-2023	III-27
Tabel 3.2	Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-29
Tabel 3.3	Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-29
Tabel 3.4	Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-29
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-30
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan BKPSDM	IV-32
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-33
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	IV-35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan penyusunan Rencana Kerja.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan amanat.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan instrumen penting dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan peran perangkat daerah dalam memberikan pelayanan berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja perangkat daerah secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan realisasi anggaran Tahun 2023, perkiraan-perkiraan yang nyata tentang kebutuhan dan pelaksanaan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kewenangannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan prioritas target sasaran yang hendak dicapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

27. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja BKPSDM yang didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode satu tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 adalah :

1. Penyelarasan dengan visi, misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menginformasikan atau memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 beserta dengan target dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh BKPSDM selama Tahun 2025.
3. Menjadi tolak ukur pencapaian kinerja BKPSDM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Renstra BKPSDM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah
- 5.3 Rencana Tindaklanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Renstra BKPSDM

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, maka dilaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

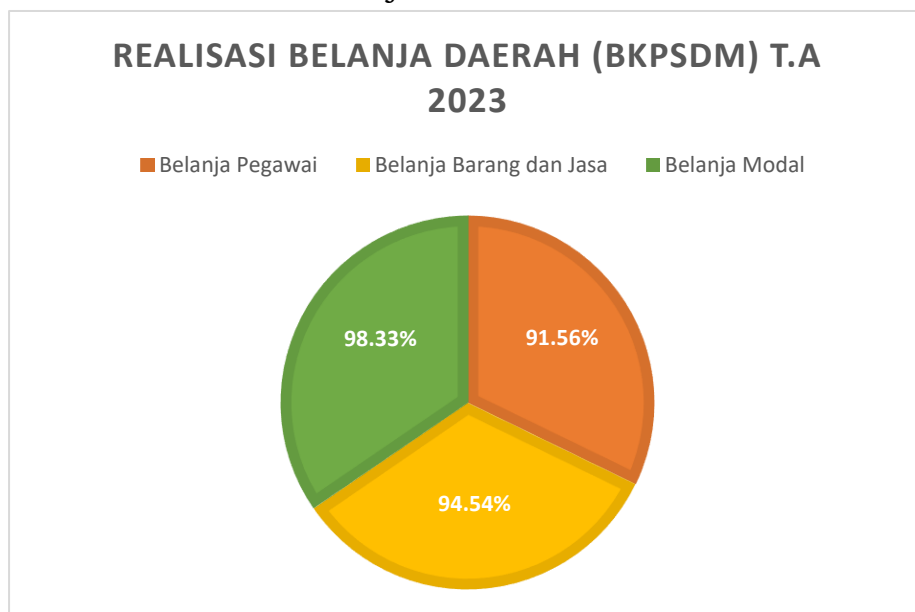
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, kepegawaian daerah, pendidikan dan pengembangan sumber daya aparatur.

Pada Tahun anggaran 2023, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. **11.601.879.824** dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **10.695.094.967** atau tercapai sebesar **92,18%**. Sementara dari sisi Belanja Operasi menganggarkan sebesar Rp. 11.598.879.824 dengan realisasi sebesar Rp.10.692.144.967,- atau 92,18% yang terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.388.421.712 atau sebesar 91,56%

- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.303.723.255 atau sebesar 94,54%

Gambar 2.1
Realisasi Belanja BKPSDM Tahun 2023



Dibawah ini ditampilkan tabel kesesuaian kinerja sasaran strategis, program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Program TA. 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program yang mendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	289 Poin	284,5 Poin	Kepegawaian Daerah	1.188.844.800	1.102.614.566
					Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.000.000	121.846.850
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62 Poin	67,12 Poin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10.288.035.024	9.470.633.551
Jumlah						11.601.879.824	10.695.094.967

Sedangkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM dan pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76,49	80,00	76,36	80,00	99,91%	76,36	80,00	103%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	77,95	86,50	77,60	86,50	100,01%	77,60	86,50	110,97%
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	92 Dokumen	57 Dokumen	14 Dokumen	18 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	21,00%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	22 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	18 Dokumen	50,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0%	0	0	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Laporan	18 Dokumen	0	0	0%	7 Laporan	4 Laporan	56,41%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,00%	80,00%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	332 Orang	191 Orang	68 Orang/Bulan	63 Orang/Bulan	100%	67 Orang/Bulan	250 Orang	75,30%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	312 Paket	169 Paket	48 Paket	48 Paket	100%	48 Paket	193 Paket	61,86%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	42 Paket	70%
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	42 Paket	70%
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	42 Paket	70%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	42 Paket	70%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	0%	0	-	0%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	3000%	-	-	0%	23	13	57,00%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Laporan	72 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	84 Laporan	70%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	42 Laporan	70%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	42 Laporan	70%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan	399 Unit	160 Unit	51 Unit	41 Unit	80,39%	53 Unit	209 Unit	52,38%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	119 Unit	68 Unit	23 Unit	22 Unit	95,65%	23 Unit	114 Unit	95,80%
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	271 Unit	89 Unit	28 Unit	18 Unit	64,28%	28 Unit	91 Unit	33,58%
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	3 Unit	0	1 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	44,44%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	96,5 Poin	88 Poin	88 Poin	88 Poin	100%	88 Poin	88 Poin	87%
		Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	132,5 Poin	72,5 Poin	77,5 Poin	72,5 Poin	93,54%	77,5 Poin	72,5 Poin	109%
		Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	128,5 Poin	124 Poin	124 Poin	124 Poin	100%	123,5 Poin	124 Poin	193%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	96,5 Poin	88 Poin	88 Poin	88 Poin	100,00%	88 Poin	88 Poin	91,19
		Rasio Pegawai Fungsional	22,50%	23,06%	19,94%	23,06%	115,00%	20,70%	23,32%	103,62%
03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	30 Poin	17,5 Poin	17,5 Poin	17,5 Poin	100%	17,5 Poin	17,5 Poin	100%
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59%	59%
01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	102,5 Poin	55 Poin	60 Poin	55 Poin	91,67%	60 Poin	55 Poin	107%
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	100%	82,52%	100%	82,52%	82,52%	100%	83,60%	82,30%
02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mengikuti assesment	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan bantuan stimulan biaya pendidikan	525 Orang	57 Orang	0	0	0,00%	-	57 Orang	10,86%
2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	128,5 Poin	124 Poin	123,5 Poin	87,25	73,32%	123,5 Poin	124 Poin	-
02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	4.502 Orang	937 Orang	1.193 Orang	0	0%	1.073 Orang	1.321 Orang	29,34%
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	18 JP/Orang/Tahun	13,28 JP/Orang/Tahun	14 JP/Orang/Tahun	13,28 JP/Orang/Tahun	95,00%	16 JP/Orang/Tahun	0,79 JP/Orang/Tahun	4,40%
2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6%	4,31%	6%	4,31%	72,00%	6%	1,90%	31,00%
01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.307 Orang	168 Orang	340 Orang	0	0%	100 Orang	234 Orang	17,90%
04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00%
2,02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3%	0,83%	3%	0,00%	0,00%	3%	0,83%	27,70%
07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	2 Laporan	0	0	0%	1 Laporan	2 Laporan	40,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator program kepegawaian daerah tidak mencapai target yang diharapkan yaitu indeks sistem merit aspek pengembangan karir. Hal ini karena masih adanya eviden atau bukti dukung pelaksanaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan dokumen yang seharusnya atau seperti :

- Belum ditetapkannya kebijakan atau Peraturan Bupati tentang manajemen talenta.
- Belum tersedianya talent pool yang didasarkan pada pemetaan kompetensi dan kinerja untuk setiap level jabatan.
- Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh ke setiap jabatan. Standar Kompetensi Jabatan yang sudah ditetapkan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator.
- Terbatasnya penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Belum dilaksanakannya assessment terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyusunan profil pegawai berdasarkan kompetensi/talenta.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu realisasi indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun juga masih dibawah target yang telah ditetapkan, dari target 14 JP/orang/tahun tercapai sebesar 13,28 JP/orang/tahun sehingga capaiannya sebesar 95%. Hal ini karena di Tahun 2023 anggaran untuk pengembangan kompetensi sangat terbatas sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi dimaksimalkan melalui pelaksanaan webinar (zoom meeting). Selain itu perangkat daerah belum sepenuhnya melaporkan data riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh aparatur sipil negara pada masing-masing perangkat daerah.

Namun untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja indikatornya telah

melampaui target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	289	284,5	98,44%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	67,12	108,26%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Sistem Merit masih dibawah target yang telah ditetapkan. Penghambat ketidaktercapaian target indikator kinerja ini adalah masih adanya eviden atau bukti dukung pelaksanaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan dokumen yang seharusnya atau seperti :

- a. Belum ditetapkannya kebijakan atau Peraturan Bupati tentang manajemen talenta.
- b. Belum tersedianya talent pool yang didasarkan pada pemetaan kompetensi dan kinerja untuk setiap level jabatan.
- c. Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh ke setiap jabatan. Standar Kompetensi Jabatan yang sudah ditetapkan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator.
- d. Terbatasnya penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

- e. Belum dilaksanakannya assessment terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyusunan profil pegawai berdasarkan kompetensi/talenta.
- f. Belum adanya peraturan terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan tata cara promosi dan mutasi yang mengacu pada talent pool dan rencana suksesi.

Untuk indikator kinerja nilai reformasi birokrasi perangkat daerah target sudah terlampaui, hasil evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai sebesar **67,12 poin** dengan Kategori B dan predikat Cukup Baik sehingga capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 108,2% (predikat “Sangat Baik”).

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja nilai reformasi birokrasi perangkat daerah diantaranya :

1. Adanya perubahan kebijakan tentang Instrumen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya sehingga indikator penilaian reformasi birokrasi perangkat daerah Tahun 2023 sangat berbeda dengan Tahun 2022.
2. Adanya praktek baik berupa optimalisasi pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang manfaatnya dirasakan sangat besar oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tentu saja mendongkrak perolehan nilai reformasi birokrasi BKPSDM Tahun 2023.

Sedangkan untuk capaian IKK, dari 3 IKK yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ada 2 IKK yang tidak mencapai target yaitu Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan). Capaian kinerja outcome Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi sebagai berikut :

- ✓ Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi
- ✓ Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kabupaten Tasikmalaya

Capaian kinerja rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 59,10%, masih dibawah target yang diharapkan, hal ini karena masih terdapat 191 pegawai fungsional yang belum memiliki sertifikat kompetensi, diantaranya adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan sesuai Permenpan 17 Tahun 2021 dan pegawai PNS jabatan fungsional yang sesuai dengan formasi Pengadaan CPNS.

Berdasarkan PP no. 17 Tahun 2020 bahwa Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berstatus PNS;
- b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e) nilai prestasi keda paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f) syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari keterangan diatas, tidak ada syarat uji kompetensi bagi pengangkatan pertama jabatan fungsional, sehingga masih banyak Pegawai Negeri Sipil angkatan baru yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/SPM/IKK/SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Sistem Merit	Poin	312	289	289	291,5	284,5	289	291,5	IKU PD
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	61	62	73	76	67,12	73	76	IKU PD
3	Rasio Pegawai Fungsional	%	17,59	19,94	20,70	22,50	23,06	23,43	23,43	IKK
4	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	59,10	100	100	IKK
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	100	100	100	100	82,51	83,6	100	IKK
6	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	7,4	7,4	7,4	7,4	3,7	3,7	7,4	SDG's
7	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	7,69	7,69	7,69	7,69	3,85	3,85	7,69	SDG's

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dan menjadi perhatian utama pada Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2023, permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya serta berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, permasalahan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian Indeks Sistem Merit. Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 yaitu sebesar 284,5 poin.
2. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG yang berkelanjutan (Pengembangan fitur layanan kepegawaian yang terintegrasi SIMPEG).
3. Kompetensi pejabat dalam mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama karena memasuki purna tugas di Tahun 2025 yaitu :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Keterbatasan sumber daya manusia ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari segi kualitas dan kuantitas.
- d. Tindaklanjut penataan pegawai non ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Adapun isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah

Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 (pra Renja Tahun 2025), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merencanakan untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.884.221.852 (dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Review terhadap rancangan awal RKPD selengkapnya akan ditampilkan dalam tabel 2.5 :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.03.01	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Poin	12.799.221.852	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Poin	12.670.128.760
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	81,80 Poin					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	81,80 Poin	
2.01	Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	15 Dokumen	160.000.000	Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	15 Dokumen	160.000.000
0001	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	105.000.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	105.000.000
0007	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	55.000.000
2.02	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.834.873.752	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.834.873.752
0001	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/Bulan	10.834.873.752	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/Bulan	10.834.873.752
2.06	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	100%	538.124.100	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	48 Paket	483.124.008
0002	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	112.124.100	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	112.124.829
0005	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.800.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.799.179
0006	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000
0009	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.200.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.200.000
0011	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0
2.07	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88.000.000	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88.093.000
0006	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	88.000.000	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	88.093.000

Kode	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
2.08	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	714.640.000	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	640.490.000		
0002	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.840.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.840.000		
0004	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	511.800.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437.650.000		
2.09	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 Unit	463.584.000	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Unit	463.548.000		
0001	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	22 Unit	215.050.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	22 Unit	215.048.000		
0006	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28.534.000	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	28.500.000		
0009	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	220.000.000	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000		
5.03.02	Program	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	88 Poin	3.035.000.000	Program	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	88 Poin	3.087.999.269		
				Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	80 Poin						Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	80 Poin		
				Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	123,5 Poin						Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	123,5 Poin		
2.01	Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	88 Poin	1.495.000.000	Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Nilai sistem merit aspek Perencanaan Kebutuhan, aspek pengadaan dan sistem informasi	88 Poin	1.494.999.689		
				Rasio Pegawai Fungsional	23,06%					Rasio Pegawai Fungsional	23,06%			
0003	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	990.000.000	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	990.000.000		
0006	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	55.000.000		
0010	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	449.999.689		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2.02	Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	17,5 Poin	599.500.000	Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	17,5 Poin	543.000.000	
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	100%					Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	100%		
0001	Sub Kegiatan	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	110.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	123.000.000	
0002	Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	120.000.000	
0003	Sub Kegiatan	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	434.500.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	300.000.000	
2.03	Kegiatan	Pembangunan Kompetensi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	62,5 Poin	280.500.000	Kegiatan	Pembangunan Kompetensi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	62,5 Poin	390.000.000	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	100%					Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	100%		
0003	Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	115.500.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	225.000.000	
0004	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	41 Orang	165.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	46 Orang	165.000.000	
2.04	Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	123,5 Poin	660.000.000	Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Aspek Perlindungan dan Pelayanan	123,5 Poin	659.999.580	
0002	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000	
0004	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	1.073 Orang	485.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	1.669 Orang	484.999.580	
0008	Sub Kegiatan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	75.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	75.000.000	
5.04.02	Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	16 JP/Orang/Tahun	7.050.000.000	Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	16 JP/Orang/Tahun	3.552.901.996	
2.01	Kegiatan	Pembangunan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6%	1.050.000.000	Kegiatan	Pembangunan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6%	1.450.000.000	
0001	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
0003	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	500 Orang	500.000.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2.194 Orang	700.000.000	
0004	Sub Kegiatan	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	600.000.000	
2.02	Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3%	6.000.000.000	Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3%	2.102.901.996	
0007	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	6.000.000.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2.102.901.996	
JUMLAH						22.884.221.852	JUMLAH					19.311.030.025	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum perangkat daerah BKPSDM. Forum perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, namun dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Kementerian/Lembaga dan instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah KemenPAN dan RB, BKN dan BKD Propinsi Jawa Barat.

Visi KemenPAN dan RB adalah **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, KemenPAN dan RB merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dari visi dan misi KemenPAN dan RB Tahun 2020-2024, selanjutnya ditetapkan tujuan KemenPAN dan RB yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Selain Rencana Strategis KemenPAN dan RB, dokumen rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya juga merujuk pada Rencana Strategis BKN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 81 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, visi Badan Kepegawaian Negara adalah **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Rumusan misi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan pula tujuan Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta

nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis;

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya juga merujuk pada Rencana Strategis BKD dan BPSDM Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen membangun ASN Juara dan Birokrasi Juara dengan menerapkan Sistem Merit dengan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 :

Tujuan : Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan

Sasaran : Terwujudnya ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Profesional, Berintegritas, Netral Dan Berkinerja Tinggi.

Adapun indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut diatas melalui pengukuran Indeks Sistem Merit. Target Indeks Sistem Merit yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BKD Propinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Terwujudnya ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	294	325	375,5	380,5	390

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedang sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab perangkat daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi urusan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum pada **Misi kedua** yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**.

Adapun prioritas dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
				Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran perangkat daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025
1	Mewujudkan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	313 Poin

Tabel 3.4
Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	313 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,18 Poin

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	313 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,18 Poin

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tahun 2025, tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya mendukung pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saja, namun harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tujuan BKPSDM sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 5 dan 16. Tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan dan tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi

yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan. Hasil perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan BKPSDM

No	Sasaran BKPSDM	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang profesional berdasarkan Sistem Merit	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan : 1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran BKPSDM	Nama Program/Kegiatan
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang terdiri dari 3 program yang akan dijabarkan dalam 12 kegiatan serta 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 19.311.030.025 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang berasal dari APBD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	Inovasi Pelayanan Publik	Kepegawaian Daerah	3.087.999.269	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.494.999.689	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	990.000.000	DAU
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	55.000.000	DAU
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	449.999.689	DAU
		Mutasi dan Promosi ASN	543.000.000	
		Pengelolaan Mutasi ASN	123.000.000	DAU
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	120.000.000	DAU
		Pengelolaan Promosi ASN	300.000.000	DAU
		Pengembangan Kompetensi ASN	390.000.000	
		Pengelolaan Assessment Center	225.000.000	DAU
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	165.000.000	DAU
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	659.999.580	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.000.000	DAU
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	484.999.580	DAU		
Pengelolaan Penyelenggaraan Pelanggaran Disiplin ASN	75.000.000	DAU		

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.552.901.996	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.450.000.000	
		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	150.000.000	DAU
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	700.000.000	DAU
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	600.000.000	DAU
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.102.901.996	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.102.901.996	DAU

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit Penanggung Jawab		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur			Target
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								19.311.030.025					19.207.144.037	
5 03	KEPEGAWAIAN								15.758.128.029					17.302.144.037	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah				86,70 Poin			12.670.128.760					13.963.644.037	SEKRETARIAT
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah				82 Poin									
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah			15 Dokumen	160.000.000						121.000.000	
5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tasikmalaya		8 Dokumen	105.000.000		Dana Alokasi Umum				60.500.000	
5 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tasikmalaya		7 Laporan	55.000.000		Dana Alokasi Umum				60.500.000	
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10.834.873.752						11.918.361.127	
5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tasikmalaya		59 Orang/Bulan	10.834.873.752		Dana Alokasi Umum				11.918.361.127	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan			100%	483.124.008						531.436.510	
5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Paket	112.124.829		Dana Alokasi Umum				123.336.510	
5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Paket	19.799.179		Dana Alokasi Umum				21.780.000	
5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Dokumen	30.000.000		Dana Alokasi Umum				33.000.000	
5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan	321.200.000		Dana Alokasi Umum				353.320.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur		Target	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	88.093.000				96.800.000			
5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		16 Unit	88.093.000	Dana Alokasi Umum			96.800.000			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24 Laporan	640.490.000				786.104.000			
5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan	202.840.000	Dana Alokasi Umum			223.124.000			
5 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan	437.650.000	Dana Alokasi Umum			562.980.000			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan			57 Unit	463.548.000				509.942.400			
5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya		Kab. Tasikmalaya		23 Unit	215.048.000	Dana Alokasi Umum			236.555.000			
5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Tasikmalaya		32 Unit	28.500.000	Dana Alokasi Umum			31.387.400			
5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tasikmalaya		2 Unit	220.000.000	Dana Alokasi Umum			242.000.000			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi				94 Poin		3.087.999.269				3.338.500.000			
		Nilai Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi				95 Poin									
		Nilai Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan				124 Poin									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur			Target
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Nilai sistem merit aspek Perencanaan Kebutuhan, aspek pengadaan dan sistem informasi				94 Poin	1.494.999.689				1.644.500.000	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
				Rasio Pegawai Fungsional				22,88%							
5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		990.000.000	Dana Alokasi Umum			1.089.000.000		
5 03 02 2.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		55.000.000	Dana Alokasi Umum			60.500.000		
5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		449.999.689	Dana Alokasi Umum			495.000.000		
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN			Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi				20 Poin	543.000.000				659.450.000	BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi				75,00%							
5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		123.000.000	Dana Alokasi Umum			121.000.000		
5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Kab. Tasikmalaya		2 Dokumen		120.000.000	Dana Alokasi Umum			60.500.000		
5 03 02 2.02 0003	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		300.000.000	Dana Alokasi Umum			477.950.000		
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir				75 Poin	390.000.000				308.550.000	BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)				85,00%							
5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assesment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		225.000.000	Dana Alokasi Umum			127.050.000		
5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		Kab. Tasikmalaya		46 Orang		165.000.000	Dana Alokasi Umum			181.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur			Target
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Nilai Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Aspek Perlindungan dan Pelayanan			124 Poin	659.999.580				726.000.000	BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		
5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen		100.000.000	Dana Alokasi Umum			110.000.000			
5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				Kab. Tasikmalaya	1.669 Orang		484.999.580	Dana Alokasi Umum			533.500.000			
5 03 02 2.04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Kab. Tasikmalaya	1 Laporan		75.000.000	Dana Alokasi Umum			82.500.000			
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun				20 JP/Orang/Tahun		3.552.901.996				1.905.000.000	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			12%	1.450.000.000				1.155.000.000			
5 04 02 2.01 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen		150.000.000	Dana Alokasi Umum			165.000.000			
5 04 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Tasikmalaya	2.194 Orang		700.000.000	Dana Alokasi Umum			550.000.000			
5 04 02 2.01 0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen		600.000.000	Dana Alokasi Umum			440.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur			Target
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.			3,20%	2.102.901.996					750.000.000		
5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Kab. Tasikmalaya		1 Laporan		2.102.901.996	Dana Alokasi Umum			750.000.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya memiliki prioritas yakni sub kegiatan **Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai** dengan anggaran sebesar **Rp. 484.999.580** (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) serta sub kegiatan **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian** dengan anggaran sebesar **Rp. 449.999.689** (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Selain kegiatan prioritas dimaksud, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target IKU serta indikator kinerja lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

5.2 Kaidah-kaidah

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja 2024 Triwulan II;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Memperhatikan tujuan dan sasaran yang dikehendaki;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
5. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi pembangunan.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau disisi lain dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada 29 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Drs. ~~ING FARID KHOZIN~~, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006